



PENETAPAN

Nomor: 0015/Pdt.P/2021/PA.Tgm.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah antara :

MANSUR SAPUTRA bin ANSOR, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan Ir.H. Juanda RT.001 RW. 002 Pekon Teba Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon I**;

DEVI ERLINA binti MAHDI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Ir.H. Juanda RT.001 RW. 002 Pekon Teba Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

-----Pengadilan Agama tersebut;
-----Telah membaca berkas perkara;
-----Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
-----Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonanannya tertanggal 19 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor: 0015/Pdt.P/2021/PA.Tgm. pada 15 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 April 2018 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Teba di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus bernama Sumarno, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Mahdi, adapun yang menjadi saksi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasman dan Ruslan , dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Mansur Saputra bin Ansor) berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, sedangkan Pemohon II (Devi Erlina binti Mahdi) berstatus perawan dalam usia 28 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Timur ;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Naura Pitria Junista;

5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Mansur Saputra bin Ansor**) dengan Pemohon II (**Devi Erlina binti Mahdi**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 2018, di Pekon Teba Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus;

Hal. 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0015/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Pemohon I dan Pemohon II datang ke depan persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dengan Nomor 471.13/083/20.10/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pekon Teba, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus, tanggal 15 Februari 2021 (Bukti Surat P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II dengan Nomor 140/14/15.51/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pekon Padang Manis, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, tanggal 12 Februari 2021 (Bukti Surat P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus dengan Nomor: B26/kua.08.06.10/pw.01/02/2021 tertanggal 17 Februari 2021 (Bukti Surat P.3);

Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sudah di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi Kode Bukti P.1 sampai P.3 dan diparaf;

B.-----Bukti Saksi :

dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing bernama;

Saksi I : Herwadi bin Kirmani, Identitas lengkap, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0015/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi sebagai adik ipar pemohon I;

-bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-bahwa, para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 15 April 2018 di wilayah hukum Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus, dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahdi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hasman dan Ruslan ;

-bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;

-bahwa, setelah perkawinan para pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama hingga sekarang dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

---Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kotaagung Timur dan sudah mempunyai seorang anak;

-----bahwa, adanya pernikahan ini tidak tercatat adalah karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan administrasi pencatatan perkawinan di KUA setempat karena saat menikah tidak mempunyai biaya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah hingga sekarang;

-bahwa, permohonan pengesahan nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan adanya bukti pernikahan yang sah guna pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Tempat para Pemohon tinggal dan untuk dipergunakan untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0015/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Hasman bin A. Halim, identitas lengkap, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

-----bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi sebagai tetangga pemohon I;

-bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-bahwa, para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 15 April 2018 di wilayah hukum Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus, dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahdi , dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hasman dan Ruslan ;

-bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;

-bahwa, setelah perkawinan para pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama hingga sekarang dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

---Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kotaagung Timur dan sudah mempunyai 3 orang anak;

-----bahwa, adanya pernikahan ini tidak tercatat adalah karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan administrasi pencatatan perkawinan di KUA setempat, karena Para Pemohon saat itu tidak memiliki biaya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah hingga sekarang;

-bahwa, permohonan pengesahan nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan adanya bukti pernikahan yang sah guna pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Tempat para Pemohon tinggal dan untuk

Hal. 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0015/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan, kemudian menyatakan kesimpulannya untuk tetap memohon agar mengesahkan pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut di atas

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan juga telah dilakukan pengumuman 14 hari atas adanya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dimaksud dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Mahkamah Agung RI, Edisi 2013 halaman 145;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah dengan alasan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 15 April 2018 di wilayah hukum KUA Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus, dengan wali ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai dengan saksi-saksi yang bernama Hasman dan Ruslan, adapun kepentingan pengesahan nikah ini adalah untuk pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal, dan untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0015/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, menunjukkan bahwa Pemohon I berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus, sedangkan berdasarkan Bukti Surat P.2 berupa surat keterangan Domisili, Pemohon II masih tercatat sebagai warga Pekon Padang Manis, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, karena Pemohon I belum bisa pindah domisili secara administrasi kependudukan ke tempat tinggal Pemohon I karena belum tercatat sebagai suami istri yang sah secara hukum, namun antara Pemohon I dan Pemohon II keduanya berdomisili di wilayah administrasi Kabupaten Tanggamus yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri, untuk memperkuat pengakuannya, Para Pemohon menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa mengetahui dan menghadiri pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah di wilayah hukum KUA Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus;

Hal. 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0015/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan di persidangan dan memperkuat posita permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dimana saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah juga menerangkan bahwa saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus administrasi catatan perkawinan di KUA setempat, karena saat menikah Para Pemohon tidak mempunyai biaya, sehingga Kutipan Akta Nikah milik Pemohon I dan Pemohon II tidak diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus, hal mana dikuatkan dengan bukti P.3 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim memandang telah memenuhi formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

-bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus pada tanggal 15 April 2018;

-----bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belangsung dengan persetujuan antara pemohon I (calon suami) dengan pemohon II (calon istri), ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahdi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hasman dan Ruslan ;

-bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;

Hal. 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0015/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa, selama masa perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan berpindah agama hingga sekarang dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

-bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus adalah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan dan belum mengurus administrasi pencatatan perkawinan, karena tidak ada biaya, sehingga Kutipan Akta Nikah tidak dapat diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum di atas, selanjutnya majelis hakim perlu mengetengahkan ayat al qur'an dan pendapat para ahli fiqh sebagai berikut :

al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yaitu :

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" An-Nisaa ayat 23;

Di dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 253-254 yang berbunyi :

Artinya: *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil ;*

Di dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

Artinya : *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh ;*

maka majelis hakim dapat menyatakan perkawinan tersebut memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Hukum Islam serta juga tidak

Hal. 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0015/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat halangan pernikahan sebagai dimaksud dalam Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum Perkawinan Islam dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat disahkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai petitum angka 2 surat permohonan.;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa ketika akan menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus administrasi perkawinan, sehingga Kutipan Akta Nikah tidak dapat diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kotaagung Timur, Majelis Hakim memandang bahwa alasan tersebut tidak bermaksud melecehkan Undang-Undang Perkawinan, maka untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, agar perkawinan pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut, dalam hal ini adalah di KUA Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya perkawinan pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini *voluntaire yang* sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon I dan Pemohon II sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun karena perkara ini prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan

Hal. 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0015/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanggamus tahun 2021, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah nanti;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mansur Saputra bin Ansor**) dengan Pemohon II (**Devi Erlina binti Mahdi**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2018, di Pekon Teba, Kecamatan Kotaagung Timur, kabupaten Tanggamus;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tanggamus Tahun 2021 sebesar Rp 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 Masehi / 5 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Ade Ahmad Hanif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Maswari, S.H.I, M.H.I dan Saiful Rahman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Rodiyati, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

ADE AHMAD HANIF, S.H.I

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MASWARI, S.H.I., M.H.I

SAIFUL RAHMAN, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0015/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttu,

RODIYATI, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 200.000,-
- Materai Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0015/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)